

STRUKTUR EKONOMI DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR DAERAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT

ECONOMIC STRUCTURE AND DISPARITY ECONOMIC DEVELOPMENT INTER DISTRICT IN SUMATERA BARAT PROVINCE

Easbi Ikhsan¹ dan Nadra Yudelsa Ratu²

¹Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik
Jl. Raya Jagakarsa No.70, Jagakarsa, Jagakarsa, Jakarta Selatan Telp. (021) 7873783 HP: 085265513571
Email: casbi@bps.go.id

²Badan Pusat Statistik
Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Ps. Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat Telp. (021) 3841195 HP: 082170337014
Email: nadra.ratu@bps.go.id

Naskah Masuk: 31-10-2020

Naskah Diterima: 02-11-2020

Naskah Disetujui: 27-11-2020

ABSTRACT

This research aimed to know the structure of economic growth, the level of inequality, and the relationship between economic growth and regional inequality in West Sumatra Province from 2017 to 2019. The data used in this research are secondary data and are sourced from the publication of the Statistics Indonesia (BPS). The analytical method used is the analysis of Klassen typology, Williamson index and the pearson correlation test to see the relationship between economic growth and regional inequality. Based on the results of the research from the typology analysis of Klassen, it shows that there are 5 districts in the province of West Sumatra which are in the relatively underdeveloped quadrant, namely Pasaman district, Solok Selatan district, Pasaman Barat district, Tanah Datar district, Sijunjung district. Based on the analysis using the Williamson index, the income inequality index is 0.198 and this is still relatively low. There is a strong relationship between economic growth and the level of regional inequality with the opposite direction of the relationship as evidenced by the pearson correlation test. Especially in district that are relatively underdeveloped, it is found that social capital factors in the form of communal work activities have an effect on the increase in GDP per capita in these areas.

Keywords: *Economic growth, Inequality, Klassen, Williamson Index*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui struktur pertumbuhan ekonomi, tingkat ketimpangan, dan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat pada kurun waktu 2017 hingga 2019. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder dan bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan adalah analisis tipologi Klassen dan indeks Williamson serta korelasi pearson untuk melihat hubungan anatara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan wilayah. Berdasarkan hasil penelitian dari analisis tipologi Klassen menunjukkan bahwa terdapat 5 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat berada pada kuadran relatif tertinggal yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan analisis menggunakan indeks Williamson, indeks ketimpangan pendapatan sebesar 0,198 dan ini masih tergolong rendah. Terdapat hubungan kuat antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan wilayah dengan arah hubungan berlawanan yang dibuktikan melalui uji korelasi pearson. Khusus pada wilayah yang kurang berkembang/relatif tertinggal

ditemukan bahwa faktor modal sosial berupa kegiatan gotong royong berpengaruh terhadap kenaikan PDRB per kapita di wilayah tersebut

Kata Kunci: *Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan, Klassen, Indeks Williamson*

PENDAHULUAN

Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat dilakukan dengan pengembangan wilayah melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada di wilayah tersebut. Dalam melakukan pengembangan wilayah, proses yang dilakukan tentunya tidak bisa serentak dalam wilayah yang berbeda sehingga dibutuhkan adanya ukuran untuk menentukan besarnya keberhasilan pengembangan wilayah. Keberhasilan wilayah ini dapat diukur melalui suatu acuan yaitu pertumbuhan ekonomi (Todaro and Smith, 2015).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi dalam periode jangka panjang pada suatu negara (Sukirno, 2004). Keberhasilan dari pertumbuhan ekonomi menunjukkan terjadinya kenaikan pendapatan yang memiliki tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dibandingkan waktu sebelumnya. Sehingga, dapat mempengaruhi struktur ekonomi dan berdampak kepada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut (Alfiansyah dan Budyanra, 2020).

Besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara salah satunya diukur menggunakan besarnya penambahan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dalam lingkup wilayah yang lebih kecil lagi, pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya kenaikan pendapatan baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota akibat peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto/PDRB (Hidayat dan Rahayu, 2019).

Nilai PDRB yang tinggi mengindikasikan bahwa semakin tingginya *output* produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan yang secara kasar dapat memberikan kemakmuran bagi wilayah tersebut (Umiyati, 2013). Dalam mengukur kesejahteraan perlu membagi PDRB dengan jumlah penduduk yang ada sehingga dikenal dengan PDRB per Kapita. Akan tetapi, hal ini masih belum cukup karena ada asumsi PDRB yang tinggi dihasilkan oleh segolongan kecil di masyarakat (Kiton, 2019).

Dalam pelaksanaan proses pembangunan ekonomi, kemampuan pertumbuhan ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah dapat berbeda-

beda. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan potensi sumber daya yang dimiliki di wilayah tersebut (Yunita, 2017). Beberapa wilayah mampu mempercepat pertumbuhannya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada, sedangkan beberapa wilayah lainnya masih stagnan dalam pertumbuhan ekonominya.

Perbedaan dari pembangunan ekonomi di setiap wilayah menyebabkan timbulnya ketimpangan antara suatu wilayah dengan wilayah lain (Hartono, 2008). Masalah ketimpangan di Indonesia merupakan persoalan yang belum bisa diselesaikan hingga sekarang ini. Ketimpangan ekonomi yang terjadi tidak hanya dalam wilayah Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat ataupun tengah, namun juga antar kabupaten dalam suatu provinsi.

Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data BPS, merupakan provinsi dengan laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan 2010 sebesar 3,98 dan merupakan peringkat ke 4 di Pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Selatan, Lampung dan Sumatera Utara. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan PDRB per kapita di Provinsi Sumatera Barat mencapai 4%,

tahun 2018 mencapai 4,07%, dan tahun 2019 mencapai 3,98% yang cukup menurun namun terlihat stagnan tiap tahunnya (BPS, 2020).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang dilalui oleh garis khatulistiwa dan berada di bagian barat dari Pulau Sumatera yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi vulkanik bukit barisan. Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 5.441.197 jiwa yang tersebar di 19 wilayah administratif terdiri dari 7 kota dan 12 kabupaten. Sebagian besar penduduk di Provinsi Sumatera Barat masih berfokus pada bidang pertanian di mana persentase penduduk yang bekerja yaitu sebanyak 34,30 persen. Selanjutnya, sektor lainnya yang menjadi fokus yaitu sektor perdagangan dengan persentase penduduk yang bekerja yaitu sebanyak 18,89 persen (BPS, 2020).

Sektor pertanian yang menjadi sektor utama, kadangkala dapat menimbulkan perbedaan pendapatan di tiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat mengingat kondisi geografis dari Provinsi Sumatera Barat yang tidak semua wilayah termasuk dataran tinggi. Aspek pemerataan pendapatan dari ke 19

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat menjadi hal yang utama untuk diperhatikan. Hal ini disebabkan karena pemerataan hasil pembangunan ekonomi menjadi salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional serta menghindari krisis kompleks yang bisa saja terjadi (Mopangga, 2011). Oleh karena itu, dalam prakteknya diperlukan suatu proses pembangunan ekonomi yang dapat dimaksimalkan dan menekan nilai ketimpangan ekonomi yang ada. Salah satunya yaitu dengan cara mengklasifikasikan struktur ekonomi yang ada di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam menentukan klasifikasi struktur ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, digunakan analisis topologi Klassen menggunakan data PDRB per kapita dan laju pertumbuhan PDRB. Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh (Umiyati, 2013) menganalisis ketimpangan ekonomi antar wilayah di Pulau Sumatera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera mempunyai tingkat keragaman yang berbeda-beda, dimana dengan menggunakan indeks William diperoleh Provinsi Riau dan

Kepulauan Riau memiliki angka indeks yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lainnya.

Penelitian rujukan lainnya dilakukan oleh (Iswanto, 2015) yang menganalisis ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa masih banyak daerah di Propinsi Jawa Timur yang tergolong dalam daerah relatif tertinggal, tercatat sebanyak 23 kabupaten/kota termasuk daerah relatif tertinggal. Disparitas pendapatan antar daerah di Propinsi Jawa Timur juga tergolong tinggi ($>0,5$) dengan nilai 0,4295.

Penelitian terkait struktur ekonomi dan disparitas wilayah juga dilakukan oleh (Devi, 2018) dengan mengambil fokus penelitian di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu Tipologi Klassen, Indeks William, serta analisis korelasi antara struktur ekonomi dan disparitas wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 kecamatan di Kabupaten Sleman yang termasuk dalam kategori wilayah pertumbuhan cepat, yaitu Kecamatan Sleman, Depok, dan Godean. Dari penelitian juga diperoleh disimpulkan bahwa terdapat

hubungan kuat antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat disparitas wilayah kecamatan, dengan arah hubungan berlawanan.

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, maka penelitian ini membahas mengenai struktur ekonomi dan juga mengukur tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat melalui analisis topologi Klassen dan indeks Williamson serta menganalisis hubungan indeks Williamson dengan laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Sumatera Barat menggunakan uji korelasi pearson.

METODOLOGI

Penelitian ini mengambil fokus wilayah penelitian di Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder yang bersumber dari publikasi data Badan Pusat Statistik (BPS), Potensi Desa 2018, dan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019. Beberapa data tersebut yaitu data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2017 hingga 2019, dan jumlah penduduk kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2017 hingga 2019.

Analisis yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Tipologi Klassen

Tipologi Klassen digunakan untuk mengidentifikasi posisi ekonomi suatu wilayah dengan melihat besarnya tingkat ekonomi wilayah acuan melalui suatu tipologi, dalam hal ini kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil dari tipologi ini memberikan gambaran mengenai pola dan struktur ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk kategori dengan hasil empat klasifikasi pertumbuhan ekonomi (Syafrizal, 2002). Klasifikasi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh tipologi kelasnya yaitu:

- a. Kuadran I (pertama) yaitu wilayah cepat maju dan cepat tumbuh (*high income and growth*), merupakan wilayah dalam hal ini kabupaten/kota yang memiliki laju pertumbuhan PDRB per kapita dan PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Kuadran II (kedua) yaitu wilayah yang maju tetapi tertekan (*high income but low growth*), merupakan wilayah dalam hal ini kabupaten/kota yang memiliki laju pertumbuhan

PDRB per kapita tinggi tetapi PDRB per kapita lebih rendah dibandingkan rata-rata di Provinsi Sumatera Barat.

- c. Kuadran III (ketiga) yaitu wilayah yang berkembang cepat (*high growth but low income*), merupakan wilayah dalam hal ini kabupaten/kota yang memiliki laju pertumbuhan PDRB per kapita rendah tetapi PDRB per kapita lebih tinggi dibandingkan rata-rata di Provinsi Sumatera Barat.
- d. Kuadran IV (keempat) yaitu wilayah relatif tertinggal (*low growth and low income*), merupakan wilayah dalam hal ini kabupaten/kota yang memiliki laju pertumbuhan PDRB per kapita dan PDRB per kapita yang lebih rendah dibandingkan rata-rata di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel. 1 Klasifikasi Wilayah menurut Tipologi Klassen

Laju Pertumbuhan (r) \ PDRB Per kapita (y)	$y_i > y$	$y_i < y$
	$r_i > r$	Kuadran I
$r_i < r$	Kuadran III	Kuadran IV

Sumber: Devi, 2018

Keterangan:

- y_i : PDRB per kapita kabupaten/ kota
- y : PDRB per kapita Sumatera Barat
- r_i : laju pertumbuhan PDRB kabupaten/kota
- r : laju pertumbuhan PDRB provinsi

Berdasarkan variabel laju pertumbuhan PDRB per kapita dan PDRB per kapita,

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat diklasifikasikan sesuai struktur tiap kabupaten/kota seperti yang ditampilkan pada tabel 1.

2. Indeks Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk mengetahui ketimpangan pendapatan (PDRB) yang terjadi di antar wilayah yang ada (Syafrizal, 2002). Indeks ini didasarkan pada besarnya ukuran penyimpangan PDRB per kapita di tiap kabupaten/kota dan PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat. (Umiyati, 2013) Perhitungan indeks Williamson dapat dilakukan menggunakan rumus berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (y_i - y)^2 \frac{f_i}{N}}}{y}$$

Keterangan:

- IW : Indeks Williamson
- y_i : PDRB per kapita kabupaten/ kota
- y : PDRB per kapita Sumatera Barat
- f_i : Jumlah penduduk kabupaten/ kota
- N : Jumlah penduduk Sumatera Barat

Indeks Williamson memiliki nilai indeks antara 0 sampai dengan 1 (Devi, 2018). Nilai indeks yang mendekati 1 menunjukkan kondisi ketidakmerataan yang nyata pada kabupaten/kota, sedangkan nilai indeks yang mendekati 0 menunjukkan kondisi yang relatif merata pada kabupaten/kota. Semakin besar nilai indeks yang dihasilkan, maka

semakin besar tingkat disparitas pendapatan antar kabupaten/kota. Indeks Williamson dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu:

- $IW < 0,35$: Ketimpangan rendah
- $0,35 < IW < 0,5$: Ketimpangan menengah
- $IW > 0,50$: Ketimpangan tinggi

3. Uji Korelasi Pearson (r)

Dalam mengukur hubungan antar dua variabel digunakan analisis korelasi pearson. Nilai korelasi pearson dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$r = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{[\sum(x - \bar{x})^2][\sum(y - \bar{y})^2]}^{\frac{1}{2}}$$

dengan X dan Y adalah variabel bebas dan variabel terikat. Nilai r berkisar dari -1 hingga 1. Jika nilai r negatif dan mendekati -1 maka hubungan antar kedua variabel bersifat kuat dan berlawanan arah. Sebaliknya, jika nilai r semakin mendekati 1 maka hubungan antar kedua variabel bersifat kuat dan searah. Namun, jika nilai r mendekati 0 maka hubungan antar kedua variabel bersifat lemah, sedangkan arahnya dilihat dari tanda positif dan negatif dari nilai r (Nugroho, Akbar and Vusvitasari, 2008).

4. Analisis Regresi Linear

Analisis Regresi Linear merupakan pendekatan sederhana untuk pemodelan antar satu variabel respons dengan satu atau banyak variabel prediktor (Casella, Fienberg and Olkin, 2014). Secara model statistik, regresi linear dapat dituliskan sebagai berikut:

$$y = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_1 + \dots + \hat{\beta}_n X_n + \varepsilon$$

Dimana y sebagai variabel respon, X sebagai variabel prediktor, dan ε sebagai suku error dari suatu pemodelan. Dalam menduga koefisien dari parameter β dilakukan dengan metode *Ordinary Least Square* (Kutner, Nachtsheim and Neter, 2003)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 2, pada tahun 2017 hingga 2019 rata-rata PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar 30486. Terdapat 9 wilayah dengan rata-rata PDRB per kapita di atas rata-rata PDRB per kapita provinsi yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai (31829), Kabupaten Padang Pariaman (31229), Kota Padang (44802), Kota Solok (39081), Kota Sawahlunto (42888), Kota Padang Panjang (46118), Kota Bukittinggi (45152), Kota Payakumbuh (31722), dan Kota Pariaman (38964).

Tabel. 2 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Dalam Ribu Rupiah)

No	Wilayah	PDRB Per Kapita				Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita			
		2017	2018	2019	Rata-rata	2017	2018	2019	Rata-rata
1	Kepulauan Mentawai	30916	31826	32744	31829	5,12	4,91	4,76	4,93
2	Pesisir Selatan	18979	19844	20656	19826	5,41	5,35	4,81	5,19
3	Kab.Solok	24315	25417	26541	25424	5,32	5,22	5,07	5,20
4	Sijunjung	26667	27579	28477	27574	5,26	5,09	4,83	5,06
5	Tanah Datar	25342	26559	27826	26576	5,11	5,07	5,01	5,06
6	Padang Pariaman	30049	31514	32123	31229	5,58	5,46	2,51	4,52
7	Agam	27361	28582	29753	28565	5,51	5,26	4,81	5,19
8	Lima Puluh Kota	26920	28077	29254	28084	5,53	5,26	5,1	5,3
9	Pasaman	20363	21168	21977	21169	5,08	5,00	4,84	4,97
10	Solok Selatan	21818	22529	23264	22537	5,15	5,03	4,89	5,02
11	Dharmasraya	29065	29831	30556	29817	5,44	5,31	4,98	5,24
12	Pasaman Barat	24304	25088	25735	25042	5,34	5,24	4,49	5,02
13	Padang	42806	44819	46780	44802	6,23	6,09	5,68	6,00
14	Kota Solok	37623	39088	40531	39081	5,76	5,68	5,53	5,66
15	Sawahlunto	41002	42912	44749	42888	5,74	5,52	5,34	5,53
16	Padang Panjang	44124	46143	48086	46118	5,8	5,73	5,59	5,71
17	Bukittinggi	43245	45142	47067	45152	6,08	6,02	5,88	5,99
18	Payakumbuh	30331	31710	33124	31722	6,12	6,05	5,92	6,03
19	Pariaman	37342	38939	40610	38964	5,61	5,5	5,33	5,48
	Sumatera Barat	29310	30477	31669	30486	5,30	5,16	5,05	5,17

Sumber: Data BPS Sumatera Barat, 2020

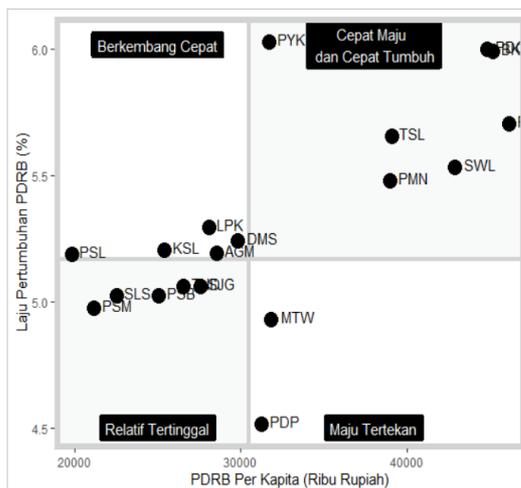
Rata-rata PDRB per kapita tertinggi dimiliki oleh Kota Padang Panjang dengan rata-rata PDRB per kapita sebesar 46118 dan rata-rata PDRB per kapita terendah dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Selatan dengan rata-rata PDRB per kapita sebesar 19826.

Berdasarkan tabel 2, Selama tahun 2017 hingga tahun 2019 rata-rata laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,17 persen. Terdapat 12 wilayah dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB di atas rata-rata provinsi adalah Kabupaten Pesisir

Selatan (5,19%), Kabupaten Solok (5,20%), Kabupaten Agam (5,19%), Kabupaten Lima Puluh Kota (5,30%), Kabupaten Dharmasraya (5,24%), Kota Padang (6%), Kota Solok (5,66%), Kota Sawahlunto (5,53%), Kota Padang Panjang (5,71%), Kota Bukittinggi (5,99%), Kota Payakumbuh (6,03%), dan Kota Pariaman (5,48%). Rata-rata laju pertumbuhan PDRB tertinggi dimiliki oleh Kota Padang dengan laju pertumbuhan PDRB sebesar 6 persen dan terendah dimiliki oleh Kabupaten Padang Pariaman dengan laju

pertumbuhan PDRB sebesar 4,52 persen.

Selanjutnya melalui identifikasi topologi Klassen di Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan dengan membandingkan rata-rata PDRB per kapita dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB untuk setiap wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Hasil topologi Klassen dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



Sumber: diolah dari Data BPS, 2020

Gambar 1. Pola dan Struktur Ekonomi Provinsi Sumatera Barat, 2017-2019 (Dalam Puluhan Ribu)

Keterangan :

- MTW : Kepulauan Mentawai
- PSL : Pesisir Selatan
- KSL : Kab.Solok
- SJB : Sijunjung
- TND : Tanah Datar
- PDP : Padang Pariaman
- AGM : Agam
- LPK : Lima Puluh Kota
- PSM : Pasaman
- SLS : Solok Selatan
- DMS : Dharmasraya
- PSB : Pasaman Barat
- PDG : Padang
- TSL : Kota Solok
- SWL : Sawahlunto
- PGP : Padang Panjang

- BKT : Bukittinggi
- PYK : Payakumbuh
- PMN : Pariaman

Berdasarkan hasil kalsifikasi menggunakan tipologi Klassen dapat diketahui struktur perekonomian wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat menjadi empat kategori atau kuadran. Pembagian 4 kategori didasarkan pada rata-rata laju pertumbuhan PDRB provinsi dan juga rata-rata PDRB per kapita provinsi.

Kategori pertama, wilayah kabupaten/kota yang tergolong cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth, high income*). Kabupaten/kota yang ada dalam kategori ini yaitu Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Kota Sawahlunto. Wilayah yang masuk kategori pertama ini merupakan wilayah dengan ciri-ciri yang sudah maju dari segi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Wilayah yang masuk kategori pertama ini biasanya merupakan daerah perkotaan dan sebagai pusat industri dan perdagangan.

Kategori kedua, wilayah maju tapi tertekan (*high income but low growth*). Kabupaten/kota yang ada dalam kategori ini yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Padang

Pariaman. Wilayah yang masuk kategori kedua ini merupakan wilayah dengan kondisi perekonomian yang cukup maju namun dalam beberapa tahun mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif kecil.

Kategori ketiga, wilayah yang berkembang cepat (*high growth but low income*). Kabupaten/kota yang ada dalam kategori ini yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Darmasraya, dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Wilayah yang masuk kategori ketiga ini merupakan wilayah yang sebenarnya memiliki potensi sumber daya yang besar.

Kategori keempat, wilayah yang relatif tertinggal (*low growth and low income*). Kabupaten/kota yang ada dalam kategori ini yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung. Lima wilayah yang termasuk dalam kategori relatif tertinggal. Hal ini diakibatkan karena rendahnya rata-rata laju pertumbuhan PDRB dan juga rendahnya rata-rata PDRB pada rentang tahun 2017 hingga 2019.

Ketimpangan PDRB per kapita antar wilayah memberikan gambaran

mengenai perkembangan perekonomian di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Ketimpangan wilayah dianalisis melalui indeks Williamson. Semakin rendah nilai indeks Williamson maka ketimpangan yang terjadi semakin kecil. Begitupun sebaliknya, jika nilai indeks Williamson semakin besar maka ketimpangan yang terjadi juga semakin besar. Tabel 3 menunjukkan angka ketimpangan yang diukur melalui indeks Williamson yang ada di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2017 hingga 2019.

Tabel 3. Indeks Wiliamson dengan Laju Pertumbuhan PDRB di Provinsi Sumbar Tahun 2017-2019

Tahun	Indeks Williamson	Laju Pertumbuhan PDRB (%)
2017	0,271	5,30
2018	0,273	5,16
2019	0,276	5,05
Rata-rata	0,275	5,17

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel 3, angka indeks ketimpangan di Provinsi Sumatera Barat secara rata-rata bernilai 0,275. Angka ketimpangan tersebut tergolong rendah karena rata-rata indeks Williamson untuk Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 0,275 berada dibawah batas rata-rata indeks William yaitu 0,35. Hal ini dapat dikatakan bahwa ketimpangan perekonomian di Provinsi Sumatera Barat tergolong rendah. Dari tabel 3

juga terlihat dalam kurun waktu 2017 hingga 2019 indeks Williamson cenderung meningkat namun relatif tidak terlalu besar seperti tahun 2017 Indeks Williamson sebesar 0,271 naik menjadi sebesar 0,273 tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar 0,276. Semakin tingginya nilai indeks Williamson menandakan adanya pembangunan dan menyebabkan kenaikan angka ketimpangan walaupun relatif tidak besar.

Menurut Caska and Riadi (2012), indeks Williamson hanya menjelaskan distribusi PDRB per kapita di Provinsi Sumatera Barat tanpa menjelaskan seberapa besar PDRB per kapita antar kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang didistribusikan tersebut dengan rata-rata PDRB wilayah atau kabupaten lainnya. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana hubungan antara ketimpangan (yang diukur melalui indeks Williamson) dengan pertumbuhan ekonomi (melalui laju pertumbuhan PDRB) digunakan analisis korelasi pearson.

Laju pertumbuhan PDRB dalam analisis korelasi pearson dianggap sebagai variabel bebas dan indeks Williamson sebagai variabel terikat. Adapun hasil korelasi pearson melalui

software R disajikan melalui gambar 2 berikut.

```
Pearson's product-moment
correlation

data: dataset2$`Indeks
Williamson` and dataset2$`Laju
Pertumbuhan
PDRB (%)`
t = -28.228, df = 1, p-value =
0.02254
alternative hypothesis: true
correlation is not equal to 0
sample estimates:
      cor
-0.9993731
```

Sumber: diolah sendiri pada Aplikasi R
Gambar 2. Output R dari Uji Korelasi Pearson Antara Indeks Wiliamson dengan Laju Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan *output* R pada gambar 2 di atas, melalui uji korelasi pearson laju pertumbuhan PDRB (dalam persen) memiliki hubungan yang sangat kuat dengan indeks Williamson dengan hubungan yang bersifat negatif sebesar -0,999. Hubungan antar kedua variabel tersebut juga signifikan, dibuktikan dengan nilai *p-value* sebesar 0,02 atau 2 persen yang kurang dari 5 persen (nilai signifikansi) sehingga hubungan korelasi keduanya secara statistik signifikan dan ada.

Hasil korelasi pearson dapat diinterpretasikan sebagai tingkat ketimpangan akan menurun seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Hal ini menandakan semakin majunya pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat, diharapkan angka pemerataan

pembangunan (diukur melalui ketimpangan) juga semakin merata (indeks Williamson yang mendekati 0).

Selanjutnya, untuk melihat faktor-faktor ketimpangan pada wilayah yang kurang berkembang/relatif tertinggal dilakukan analisis regresi linear dengan metode *ordinary least square* antara PDRB per kapita dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti penelitian dari Warda et al (2019) sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar faktor dan variabel-variabel yang digunakan untuk analisis regresi

Faktor	Variabel yang digunakan
Sumber Daya Manusia	1. Rata-rata lama sekolah
Modal Fisik	1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi sehat 2. Cakupan keluarga yang memiliki akses listrik 3. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk
Modal Finansial	1. Jumlah koperasi unit desa 2. Jumlah bank 3. Jumlah pasar 4. Jumlah pertokoan
Modal Sosial	1. Banyaknya kriminalitas yang terjadi 2. Banyaknya jenis upaya masyarakat untuk 3. menjaga keamanan lingkungan 4. Banyaknya penyelenggaraan kegiatan kerja bakti/gotong-royong
Sumber Daya Alam	1. Banyaknya pencemaran yang terjadi 2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak
Kondisi Kesejahteraan	1. Proporsi rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan 2. Rata-rata konsumsi perkapita

Sumber: Dikutip dari Warda et al (2019)

Melalui hasil analisis linier berganda diperoleh dari sekian banyak faktor yang digunakan dalam pemodelan, ternyata hanya faktor modal sosial berupa banyaknya penyelenggaraan kegiatan kerja bakti gotong-royong yang mampu yang signifikan terhadap PDRB per kapita pada tingkat kesalahan (α) 5 persen. Model regresi linear yang dihasilkan juga baik/signifikan pada uji F dengan *F-Statistic* sebesar 11,99 dan *p-value* sebesar 0,04 yang berarti model ini signifikan pada tingkat kesalahan (α) 5 persen.

```
> summary(model_)
Call:
lm(formula = pdrb_perkapita ~ goro, data = dataa)

Residuals:
 1399.9  169.7 -1239.9 1012.3 -1342.0

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 16074.88    2786.48    5.769  0.0104
*
goro          193.03     55.75    3.462  0.0406
*
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1455 on 3 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7998,    Adjusted R-squared:  0.7331
F-statistic: 11.99 on 1 and 3 DF,  p-value: 0.04057
```

Sumber: diolah sendiri pada Aplikasi R

Gambar 3. Output r dari analisis regresi linear antara PDRB per kapita dengan faktor modal sosial berupa penyelenggaraan gotong royong.

Model regresi yang dihasilkan dapat diinterpretasikan pada daerah yang tergolong relatif tertinggal, setiap kenaikan satu satuan banyaknya penyelenggaraan kerja bakti/gotong royong mampu meningkatkan PDRB per kapita sebesar 193,03. Dari gambar

3 di atas berdasarkan hasil *multiple R-square* sebagai Koefisien Determinasi (*Multiple R-Squared*) dapat diinterpretasikan bahwa variabel PDRB per kapita dapat dijelaskan oleh variabel penyelenggaraan kerja bakti/gotong royong sebesar 79,98% sedangkan sisanya 20,02% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang belum tercakup dalam penelitian ini.

Keterkaitan modal sosial dalam terhadap tingkat perekonomian di suatu wilayah juga telah dikaji secara kualitatif dalam beberapa penelitian seperti Primadona (2017) yang menemukan bahwa mengenai pengaruh modal sosial sangat kuat berperan dalam keberlangsungan UKM kerajinan sulaman, bordir dan pertununan di Sumatera Barat. Kemudian dari penelitian Analia et al., (2019) yang juga membahas mengenai modal sosial dalam penentuan keberhasilan UKM di Kota Padang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis tipologi Klassen, terdapat 7 wilayah yang berada pada kategori pertama (*high growth and high income*) dimana

semua wilayahnya secara administratif merupakan wilayah perkotaan. Ada 2 wilayah yang berada pada kuadran dua (*high income but low growth*). Terdapat 5 kabupaten di kuadran ketiga (*low growth dan low income*) dan terdapat 5 kabupaten di kuadran keempat (*low growth and low income*).

2. Berdasarkan perhitungan indeks Williamson, tingkat ketimpangan di Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,275 dan termasuk ketimpangan rendah.
3. Melalui hasil korelasi pearson antara tingkat ketimpangan dan laju pertumbuhan PDRB diperoleh bahwa adanya hubungan yang kuat dan berlawanan arah. Hal ini menandakan bahwa apabila laju pertumbuhan ekonomi meningkat maka tingkat ketimpangan akan menurun dan begitu juga berlaku kebalikannya.
4. Pada wilayah yang kurang berkembang/relatif tertinggal ditemukan bahwa faktor modal sosial berupa kegiatan gotong royong berpengaruh terhadap kenaikan PDRB per kapita di wilayah tersebut.

REKOMENDASI

1. Dalam mengatasi permasalahan ketimpangan antar wilayah, pemerintah wilayah perlu melakukan pemerataan pembangunan antar wilayah melalui perencanaan pembangunan yang diprioritaskan pada wilayah yang relatif tertinggal (*low growth and low income*).
2. Pada wilayah yang kurang berkembang/relatif tertinggal dapat dioptimalisasikan nilai modal sosial berupa gotong royong yaitu melalui pemberdayaan UKM dan pemberian pelatihan yang berprinsip pada nilai-nilai gotong royong yang ada di masyarakat.
3. Terkait kondisi *Covid-19* saat ini, Pengembangan modal sosial berupa gotong royong dapat digalakkan melalui program yang melibatkan generasi muda dengan pemanfaatan teknologi seperti *video campaign*, diskusi interaktif (*webinar*), serta konten sosial media yang tujuannya untuk memberdayakan produk-produk dari UKM dan aksi kepedulian sosial serupa lainnya, yang diharapkan secara tidak langsung mampu memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, H. and Budyanra, B., 2020. Analisis Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017. In: *Seminar Nasional Official Statistics*. pp.424–429.
- Analia et al., 2019. Modal sosial. *Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 3(1), pp.108–117.
- BPS, B.P.S., 2020. *Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2020*.
- Casella, G., Fienberg, S. and Olkin, I., 2014. *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R*. [online] Available at: <<http://books.google.com/books?id=9tv0taI8l6YC>>.
- Caska and Riadi, R., 2012. Pertumbuhan Dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Riau. *JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan)*, [online] 12(21). Available at: <<http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIP/article/view/573>>.
- Devi, M.K., 2018. Struktur Ekonomi Dan Disparitas Wilayah Kabupaten Sleman. *Kurvatek*, 3(1), pp.91–99.
- Hartono, B., 2008. Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. pp.1–78.
- Hidayat, M. and Rahayu, S., 2019. Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau: Pendekatan Regresi Kuadrat. *Jurnal Ekonomi Sakti (JES)*, [online] 7(1), pp.13–21. Available at: <<http://jes.stiesak.ac.id/index.php/103044/article>>

- /view/156>.
- Iswanto, D., 2015. KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA dan PERTUMBUHAN EKONOMI di PROPINSI JAWA TIMUR. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), pp.41–66.
- Kiton, M.A., 2019. Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Smart*, III(2), pp.68–80.
- Kutner, M.H., Nachtsheim, C.J. and Neter, J., 2003. *Applied Linear Regression Models*. McGraw-Hill Higher Education.
- Mopangga, H., 2011. Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Trikonomika*, 10(1), pp.40–51.
- Nugroho, S., Akbar, S. and Vusvitasari, R., 2008. Kajian Hubungan Koefisien Korelasi Pearson (r), Spearman-rho (ρ), Kendall-Tau (τ), Gamma (G), dan Somers (dyx). *Jurnal Gradien*, 4(2), pp.372–381.
- Primadona, 2017. Modal sosial, kewirausahaan dan inovasi pada UKM kerajinan sulaman, bordir dan pertenunan di Sumatra Barat. *Polibisnis*, 9(1), pp.90–101.
- Sukirno, 2004. *Makroekonomi teori pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Syafrizal, 2002. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Todaro, M.P. and Smith, S.C., 2015. *Economic Development (Twelfth Edition)*.
- Umiyati, E., 2013. Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Pulau Sumatera. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1(7), pp.42–50.
- Warda, N., Elmira, E., Rizky, M., Nurbani, R.I. and Izzati, R. Al, 2019. *Bagaimana Mencegah Peningkatan Ketimpangan dalam Desa ?* [online] Available at: <https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/1._wp_tifa2_2019-9-6.pdf>.
- Yunita, 2017. Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.